

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan secara tradisional dapat diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi wilayah awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama menuju peningkatan pendapatan nasional bruto atau GNI (*gross national income*) tahunan. Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pada hakikatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total dari suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya. Pembangunan memiliki tujuan akhir yaitu bergerak maju menuju kondisi kehidupan yang lebih baik.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang pada saat ini adalah pembangunan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia (*humam development*). Perubahan paradigma pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan manusia menekankan terpenuhinya kehidupan yang layak bagi manusia, baik layak secara materi maupun non materi. Pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan

manusia sebagai tujuan akhir bukan sebagai alat pembangunan, karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

United Nations development progame tahun 1990 (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara di lihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi (standar hidup layak). Ketiga indikator tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan merupakan factor dari IPM itu sendiri. Nilai indeks pembangunan manusia yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain daripada itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi.

Ul Haq (2012), menekankan perlunya manusia menjadi inti dari ide pembangunan. Ini berarti mengelola semua sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan guna meningkatkan kemampuan manusia. Garis pemikiran ini konsisten dengan UNDP yang diterjemahkan ke dalam beberapa indikator sosial ekonomi yang mewakili kualitas hidup pada beberapa ukuran kuantitatif, antara lain: Kapasitas ekonomi, kapasitas pengetahuan dan keterampilan, serta kemampuan untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. (Ranis dalam Yusniah, 2018)

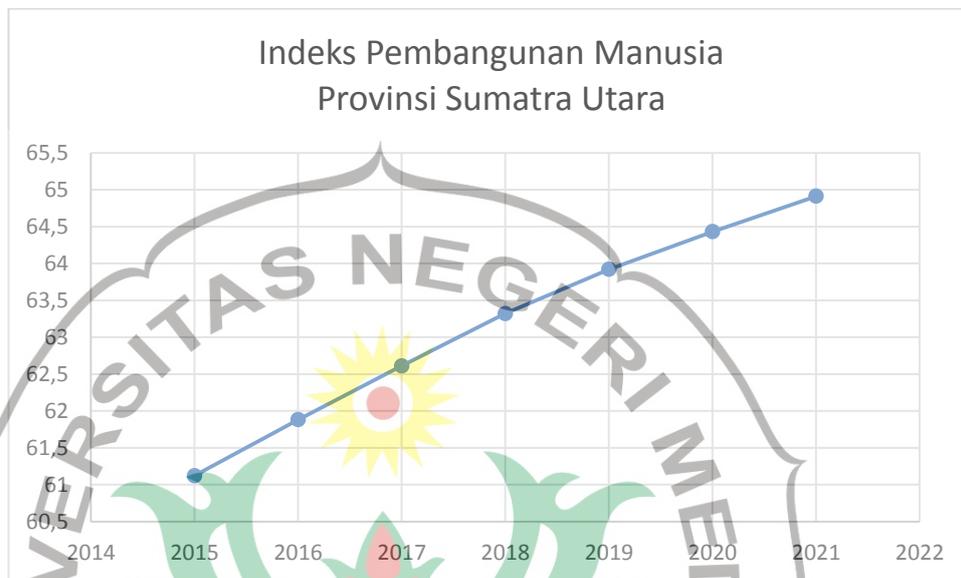
Setiap wilayah yang memiliki angka IPM yang mendekati angka 100 maka pembangunan manusia yang ada di daerah tersebut semakin baik, sedangkan daerah yang memiliki angka IPM yang mendekati nol maka daerah tersebut memiliki pembangunan manusia yang buruk. Adapun kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel. 1.1 Pencapaian Nilai IPM

Nilai IPM	Status Pembangunan
	Manusia
IPM lebih dari 80	Tinggi
IPM 69-79	Menengah Atas
IPM 50-69	Menengah Bawah
IPM kurang dari 50	Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistika Sumut

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak dibagian utara pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara beribukota Medan dengan luas wilayah sejauh 72.981,23 km². Provinsi Utara menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Berdasarkan data tahun 2021 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.136.522 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 207,40 jiwa. Sumatera Utara memiliki potensi dibidang energi, pertanian, perkebunan dan beberapa sektor seperti pariwisata. Potensi-potensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan perekonomian.



Sumber : Badan Pusat Statistik

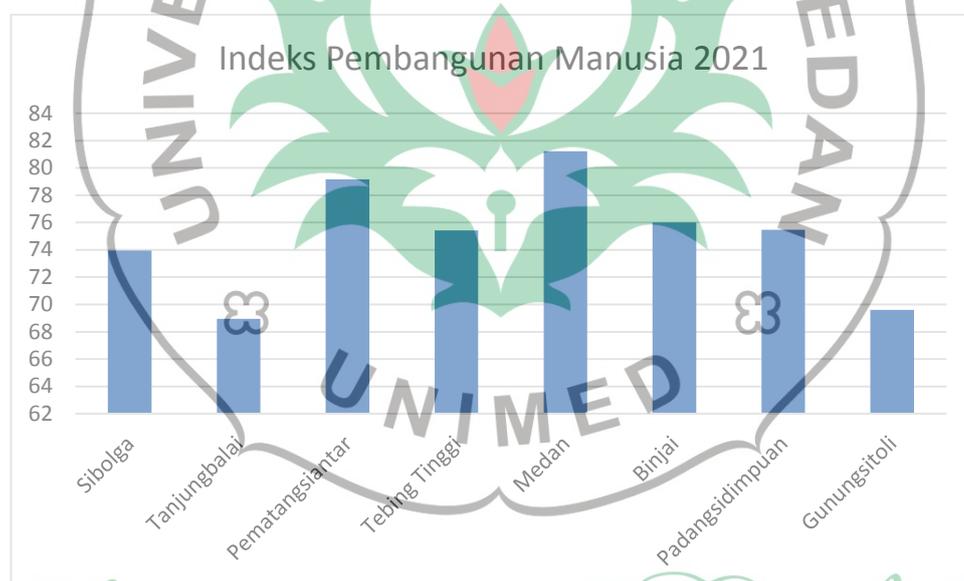
Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2021

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Sumatera utara setiap tahunnya meningkat perlahan lahan. Namun dari gambar diatas terlihat bahwa angka indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera utara masih di angka rata rata 63,17. Jika berdasarkan status,

IPM Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 hingga 2021 berada pada golongan menengah atas, hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang

pendidikan untuk rata-rata lamanya bersekolah dan kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup dan juga kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Tinggi rendahnya tingkat IPM tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan

peningkatan kesejahteraan manusia, akan membuat suatu daerah tertinggal dari daerah lain. Dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM. Penekanan terhadap pentingnya kualitas pembangunan manusia menjadi suatu kebutuhan karena dengan sumber daya yang unggul akan menghasilkan seluruh tatanan kehidupan yang maju diberbagai bidang baik sosial, ekonomi, lingkungan, sehingga kualitas manusia memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di 8 Kota Madya Provinsi Sumatera Utara tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas terlihat pada tahun terakhir beberapa kota di provinsi sumatera utara masih berada pada nilai IPM yang kurang dari 70 (<70). Hal ini menandakan bahwa beberapa kota di provinsi Sumatera Utara tergolong menengah bawah. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa Kota Medan menjadi daerah yang paling tinggi Indeks Pembangunan Manusia nya dengan nilai 81,21 sedangkan yang terendah adalah Kota Tanjung Balai dengan nilai 68.94.

Dapat disimpulkan bahwa adanya kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia diantara 8 Kota Madya yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh tiga unsur Indeks Pembangunan Manusia yaitu, Pendidikan yang di capai, Kesehatan dan yang terakhir Standar hidup layak. Jadi ketiga unsur ini amatlah penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu kota atau daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri sejalan dengan penelitian N.W Pardede:2021. Untuk kota Medan sendiri jumlah fasilitas pendidikan dirasa lebih banyak yakni jumlah sekolah sebanyak 2.514 sehingga lebih mudah dijangkau aksesnya, dibandingkan dengan Kota Tanjung Balai yang memiliki fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah sebanyak 225. Dan untuk itu pemerintah kota Tanjung Balai perlu meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri dan menyadarkan kepada masyarakat khususnya penduduk usia sekolah berdasarkan kategori usia betapa pentingnya Pendidikan.

Selanjutnya dari dimensi kesehatan, Kota Medan memiliki jumlah fasilitas kesehatan terbanyak diantara kota lainnya di Sumatera Utara yakni jumlah Rumah sakit umum sebanyak 77, rumah bersalin sebanyak 117 dan posyandu sebanyak 1390. Tak salah bila IPM kota Medan menjadi yang tertinggi, karena mudahnya mendapatkan akses dan bantuan Kesehatan. Sementara itu Kota Tanjung Balai selama lima tahun terakhir pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan di Kota Tanjung balai relatif tidak banyak mengalami perubahan. Sampai dengan 2021 Kota Tanjung balai hanya memiliki 2 rumah sakit umum Posyandu menjadi fasilitas kesehatan terbanyak di Kota Tanjung balai dengan jumlah 118 posyandu

sementara untuk rumah beresalin belum ada. Sehingga sangat sulit untuk dijangkau dan terbatas.

Pada dimensi standar hidup yang layak, untuk jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah perusahaan, Kota Medan memiliki lebih banyak lapangan pekerjaan, dan juga merupakan pusat dari perekonomian di Sumatera Utara. Hal ini mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga pengeluaran untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan primer dapat lebih mudah ditemui dibandingkan dengan Kota Tanjung Balai yang dirasa masih tidak sebanyak jumlah lapangan pekerjaan dan investasi pada kota Medan.

Secara konseptual, pembangunan manusia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi perekonomian yang tercermin dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan penduduknya (Maulana dan Bowo, 2013). Pada tahun 2014-2019 PDRB pada seluruh provinsi di Indonesia secara umum memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB yang berlangsung tersebut merupakan sebuah sarana efektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pada masing-masing provinsi di Indonesia, khususnya bagi provinsi dengan nilai IPM di bawah rata-rata IPM nasional. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya PDRB maka pendapatan perkapita penduduk akan menjadi semakin tinggi sehingga daya beli penduduk menguat dan mereka memiliki kemampuan pengeluaran yang lebih tinggi untuk melakukan konsumsi pada

barang dan jasa yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan manusia (Rahmadani, 2018). Dalam rangka memperbaiki kualitas pembangunan manusia maka dibutuhkan adanya peran campur tangan pemerintah melalui fungsi pengeluarannya. Salah satu jenis belanja pemerintah yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia adalah belanja modal. Hal ini dikarenakan belanja modal dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas publik pada bidang-bidang yang mencakup sasaran dimensi pembangunan manusia, antara lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan tersedianya fasilitas publik yang memadai maka seluruh lapisan penduduk dapat meningkatkan taraf kesejahterannya sehingga pembangunan manusia dapat berlangsung lebih optimal.

Anggraini dan Muta'ali (2013) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang berperan penting dalam mendorong pembangunan manusia. Salah satu indikator dalam indeks pembangunan manusia adalah tingkat pendapatan masyarakat yang besar.

Hal ini sejalan dengan Ranis (2014), bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin. Diketahui hal ini akan mendorong semakin dapat dipenuhi nya kebutuhan seperti dalam hal pendidikan dan kesehatan yang dapat memberikan pengaruh dan dorongan terhadap pembangunan manusia di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam rangka mengacu pertumbuhan ekonomi perlu dan harus memperhatikan aspek pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah, karena dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi di yakini juga akan lebih baik. PDRB berkaitan erat dengan IPM. Bahkan boleh dikatakan bahwa IPM merupakan pengukur kesejahteraan yang disempurnakan, sementara PDRB adalah pengukur kesejahteraan yang lama. Namun demikian, dua pengukur tersebut tidak harus selalu berjalan linier, karena peningkatan PDRB tanpa disertai peningkatan pemerataan pendapatan dan alokasi atas aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tidak akan meningkatkan IPM begitu juga sebaliknya. “Badan Pusat Statistik” menyatakan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah maka akan semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa PDRB akan sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana bila PDRB naik, maka tingkat pendapatan perkapita masyarakat akan naik, dengan naiknya pendapatan perkapita tentu konsumsi juga ikut meningkat, dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan juga meningkat. Menurut Todaro, menyatakan bahwa tingginya PDRB akan mengubah pola konsumsi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Daya beli untuk mengkonsumsi suatu barang berkaitan erat dengan IPM karena daya beli merupakan salah satu

indikator komposit dalam IPM yaitu indikator pendapatan. Berikut grafik PDRB di 8 kota madya provinsi Sumatera utara tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3 PDRB di 8 Kota Madya Provinsi Sumatera Utara 2021

Berdasarkan gambar, PDRB pada setiap kota memiliki beberapa perbedaan. Tahun 2021 Kota Padang Sidempuan menjadi daerah di Sumatera Utara dengan PDRB terendah yakni sebesar 29.798.729.00. Sedangkan jika melihat grafik daerah dengan PDRB tertinggi pada tahun 2021 adalah Kota Medan dan Kota Sibolga yakni 103.509.150,00 dan 64.449.897,00 dilanjutkan dengan Tanjung Balai 54.225.983,00 , Pematang Siantar 52.473.799,00 , Gunung Sitoli 44.017.837,00, Binjai 41.702.013,00, dan diurutan terakhir yakni Kota Tebing Tinggi sebesar 36.291.830,00. Sedangkan daerah tersibuk di Sumatera Utara yakni Kota Medan laju pertumbuhannya pada tahun 2021 sebesar 2,62%.

Tabel 1.2 PDRB di 8 Kota Madya Provinsi Sumatera Utara

Kab/Kota	Tahun	IPM	PDRB
		Y	X1
Kota Sibolga	2019	73.41	63246552.00
Kota Sibolga	2020	73.63	62649110.00
Kota Tanjung Balai	2019	68.51	50801057.00
Kota Tanjung Balai	2020	68.65	52311057.00
Kota Pematangsiantar	2019	78.57	54451429.00
Kota Pematangsiantar	2020	78.75	52051340.00
Kota Tebing Tinggi	2019	75.08	35846016.00
Kota Tebing Tinggi	2020	75.17	35142175.00
Kota Medan	2019	80.97	105623957.00
Kota Medan	2020	80.98	99800415.00
Kota Binjai	2019	75.89	42058090.00
Kota Binjai	2020	75.89	40488046.00
Kota Padangsidimpuan	2019	75.06	28478028.00
Kota Padangsidimpuan	2020	75.22	28889457.00
Kota Gunung Sitoli	2019	69.30	38509038.00
Kota Gunung Sitoli	2020	69.31	42535236.00

Sumber : BPS 2021

Dari data diatas dapat di lihat bahwa Jumlah PDRB pada tahun 2019 hingga 2020 di beberapa kota madya mengalami penurunan namun Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan di 8 Kotamadya Provinsi Sumatera Utara yang dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Maulana dan Bowo (2013), Pembangunan manusia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi perekonomian yang tercermin dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan penduduknya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh PDRB terhadap IPM di 8 Kotamadya Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya yang mempengaruhi IPM adalah Jumlah Pengangguran Terbuka . Seperti yang di ketahui kondisi sosial politik yang paling mempengaruhi indeks pembangunan manusia adalah pengangguran. Menurut

Sadono Sukirno, pengangguran akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat dan tentunya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang telah di capai seseorang. Semakin turun tingkat kesejahteraan seseorang maka meningkatnya peluang terjebak kepada Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. Tidak hanya itu tingginya angka pengangguran juga akan mengganggu kestabilan sosial dan politik suatu negara. Masalah pengangguran tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial namun juga akan menimbulkan kekacauan politik. Jika ini terjadi maka keinginan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia baik jangka menengah maupun jangka panjang akan sulit untuk diwujudkan.



Sumber : Badan Pusat Statistik

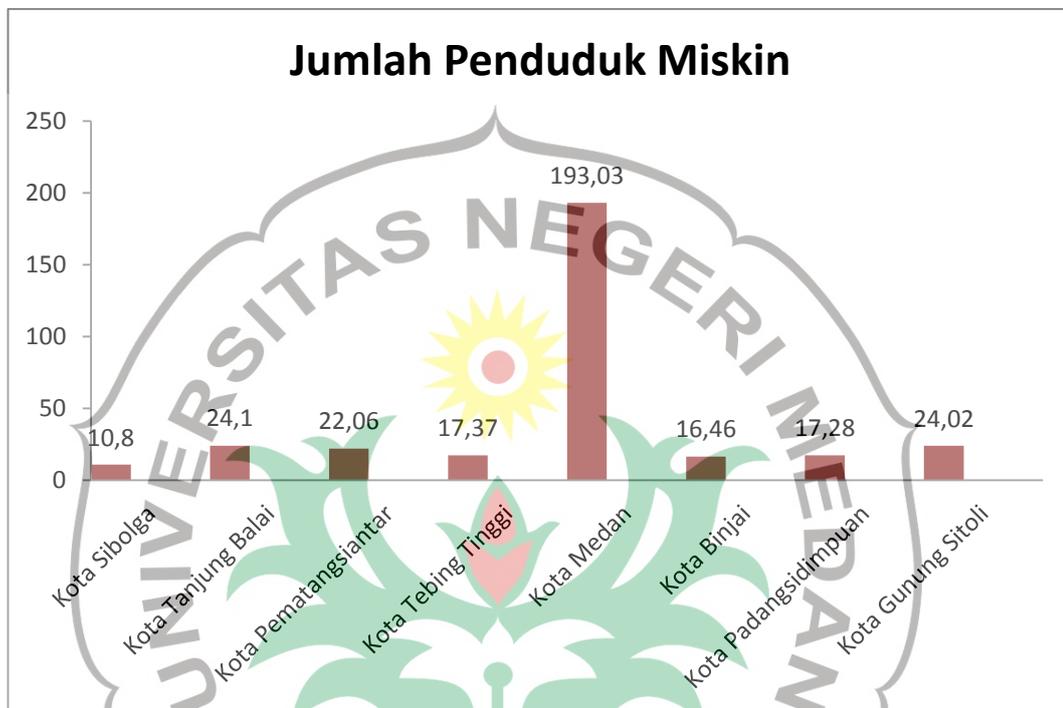
Gambar 1.3 Jumlah Pengangguran Terbuka di 8 Kotamadya Provinsi Sumut 2021

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Gunung Sitoli memiliki angka tingkat pengangguran yang paling rendah yakni 3.116 jiwa dibandingkan dengan kota Medan yakni 121.065 jiwa. Yang mempengaruhi faktor tersebut ialah jumlah penduduk di Gunung Sitoli lebih sedikit sebesar 136.017 jiwa sedangkan

di Kota Medan jumlah penduduknya lebih banyak sebesar 2.460.858 jiwa. Faktor utama yang mempengaruhi angka pengangguran di kota Medan adalah banyaknya perusahaan yang mencari tenaga kerja dengan pendidikan minimal diploma, sarjana, atau yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam dunia kerja. Dan faktor lain yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan adalah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selanjutnya, Jumlah Penduduk Miskin dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks yang berawal dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok/dasar sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. (Pardede Wiandita, 2021).

Di kondisi sekarang ini, beberapa negara miskin atau berkembang sedang membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya. Beberapa dari negara dengan penduduk miskin yang jumlahnya banyak kebanyakan memiliki skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Rendahnya skor IPM ini disebabkan karena penduduk miskin yang sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terlebih lagi memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan. Berikut merupakan data perkembangan persentase jumlah penduduk miskin di Kotamadya Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Miskin di Kotamadya Provinsi Sumut 2021

Berdasarkan gambar terlihat masih banyaknya penduduk di kota di provinsi Sumatera Utara yang masih berada pada garis kemiskinan. Kota Medan menjadi jumlah penduduk miskin terbanyak berada pada angka 193.03 ribu jiwa. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan karena banyak sekali urbanisasi ke kota Medan dengan harapan memperoleh lapangan pekerjaan dan gaji yang layak, namun sebaliknya semakin menambah jumlah orang yang berada pada garis kemiskinan. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada di Kota Sibolga dengan tingkat kemiskinan sebesar 10.8 ribu jiwa dengan jumlah penduduk 45.104 ribu jiwa.

Kemiskinan yang tinggi memberikan dampak yang buruk terhadap pemenuhan kebutuhan manusia baik itu dari kebutuhan primer, sekunder dan tersiernya. Kesulitan untuk memperoleh kebutuhan primer seperti pangan, memberikan dampak buruk bagi kesehatan, sedangkan untuk pemenuhan

kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan sulit untuk dilakukan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan persoalan yang kompleks, yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat. IPM berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perekonomian serta kemiskinan. Ini merupakan suatu topik yang sangat menarik untuk dibahas dengan melihat seberapa jauh hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari beberapa faktor seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan di Kotamadya Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan dari persoalan empiris, teoritis dan fenomena yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk membahas serta melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pengaruh PDRB, Jumlah Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 8 Kotamadya Provinsi Sumatera Utara 2017-2022”. Teknik analisis yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Tujuan menggunakan metode regresi data panel untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih baik dikarenakan jumlah observasi yang lebih banyak.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang bersinggungan dengan penelitian ini telah disampaikan dalam latar belakang masalah, namun agar lebih jelas permasalahan - permasalahan dalam penelitian ini di identifikasikan sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia di 8 kotamadya Provinsi Sumatera Utara
2. Tahun 2019-2020 PDRB di beberapa kotamadya mengalami penurunan

sementara Indeks Pembangunan Manusia di tahun tersebut meningkat. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

3. Jumlah Pengangguran yang berpusat di 8 kotamadya Provinsi Sumatera Utara khususnya di kota Medan.
4. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara yang masih memusat di Kota Medan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 109,03 ribu jiwa hal tersebut diakibatkan populasi penduduk yang memusat di Kota Medan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan Permasalahan yang penulis kaji berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Jumlah Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Miskin yang ada di 8 Kotamadya Provinsi Sumatera Utara dan data yang dipakai mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian adalah :

1. Apakah PDRB berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 8 kotamadya Sumatera Utara?
2. Apakah Jumlah Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 8 Kotamadya Sumatra Utara?
3. Apakah Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di 8 Kotamadya Sumatra Utara?

4. Apakah PDRB, Jumlah Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kotamadya Sumatra Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 8 Kotamadya Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 8 Kotamadya Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 8 Kotamadya Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh PDRB, Jumlah Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 8 Kotamadya Provinsi Sumatera Utara.

THE
Character Building
UNIVERSITY

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, Penelitian ini berguna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia di 8 kotamadya Sumatera Utara dan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan-kebijakan.
3. Bagi akademisi diharapkan dapat menjadi informasi serta referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya terutama di bidang yang sama.
4. Bagi pembaca dan masyarakat pembaca dan masyarakat pada umumnya diharapkan bisa menambah wawasan dapat ikut serta dalam membangun sektor-sektor ekonomi yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia.

THE
Character Building
UNIVERSITY